



## **Deliar Noer: Sebuah Biografi Politik, 1951-1999**

Abu Maskur<sup>1\*</sup>, Humaidi<sup>2</sup>, Nurzengky Ibrahim<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Jakarta; abumaskur26@gmail.com\*

<sup>2</sup> Universitas Negeri Jakarta; humaidi@unj.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Negeri Jakarta ; nurzengkyibrahim@unj.ac.id

\* Korespondensi

Dikirim: 02-12-2021; Diterima: 19-05-2022; Diterbitkan: 25-06-2022

**Abstract:** In contemporary Indonesian politics in Islamic thought history, Deliar Noer cannot be passed over. He is a figure in Muslim Student Association (HMI), Masyumi, Academician, and a political figure who is a substantial thinker as well, proved by his academic works. As a political figure, his intellectuality is not only seen in his writings. Nevertheless, he attempted to make it through an established political party named Partai Ummat Islam. This study aims to examine the political role of Deliar Noer in political dynamics in Indonesia from 1951 to 1999. This study implied four stages of historical research methods. Those methods are heuristic, verification, interpretation, and historiography. The results of this study convey that Deliar Noer began his political experience when he took charge as the chief of the Muslim Student Association (HMI). Furthermore, he became a political observer, defended democracy, and established a political party.

**Keywords:** chief of HMI; Deliar Noer; political party

**Abstrak:** Dalam perpolitikan Indonesia kontemporer dalam sejarah pemikiran Islam, Deliar Noer tidak bisa dilewatkan begitu saja. Ia adalah tokoh Himpunan Mahasiswa Muslim (HMI), Masyumi, Akademisi, dan tokoh politik yang juga pemikir yang substansial, dibuktikan dengan karya-karya akademisnya. Sebagai seorang tokoh politik, intelektualitasnya tidak hanya terlihat pada tulisan-tulisannya. Meski demikian, ia berusaha melalui partai politik mapan bernama Partai Ummat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran politik Deliar Noer dalam dinamika politik di Indonesia dari tahun 1951-1999. Penelitian ini mengimplikasikan empat tahapan metode penelitian sejarah. Metode-metode tersebut adalah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menyampaikan bahwa Deliar Noer memulai pengalamannya saat menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selanjutnya, ia menjadi pengamat politik, membela demokrasi, dan mendirikan partai politik.

**Kata Kunci:** Deliar Noer; ketua HMI; partai politik



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### **Pendahuluan**

Pembahasan mengenai politik tidak akan pernah ada habisnya, karena politik merupakan isu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bernegara. Politik dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh kekuasaan, mengambil keputusan dan

membuat kebijakan (Anang, 2020). Apalagi, jika membahas mengenai politik Islam atau Islam politik, tentu itu akan menjadi suatu hal yang tidak ada habisnya. Di Indonesia sendiri ada banyak tokoh yang menjadi rujukan dalam hal ini, salah satunya yaitu Deliar Noer.

Dalam sejarah pemikiran Islam politik kontemporer di Indonesia, sosok Deliar Noer tidak dapat dikesampingkan. Beliau merupakan akademisi dan juga tokoh dari Masyumi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta tokoh politik yang dibuktikan dengan berbagai karya akademisnya. Diantara beberapa karya akademisnya banyak dibaca dan dijadikan rujukan para mahasiswa yaitu buku Biografi Politik Mohammad Hatta, Partai Islam di Panggung Politik dan Pengantar Ilmu Politik. Ketiga buku tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam khazanah pendidikan politik di Indonesia dan sekaligus membuktikan kekuatan akademiknya. Deliar Noer lahir di Kota Medan pada tanggal 9 Februari 1926 atau 27 Rajab 1334 dan hari tersebut bertepatan dengan hari besar Ummat Islam yaitu Isra Mi'raj (Noer, 1996). Kedua orangtuanya berasal dari Bukittinggi, Sumatera Barat, beliau merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama Noer bin Joesoef merupakan seorang kepala pegadaian kota Medan, Sumatera Utara.

Aktivitas politik Deliar Noer dimulai ketika Deliar Noer memimpin Organisasi HMI pada tahun 1950-an, mulai dari tingkat cabang Jakarta hingga tingkat pusat. Berbagai kegitanannya di HMI ini yang kemudian mengantarkannya mengenal tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Mohammad Roem dan Buya Hamka (Gunadirdja, 2001). Deliar Noer banyak memberikan kontribusi politiknya melalui publikasi karya tulis, pengajar di universitas-universitas dan sebagai pengamat politik. Publikasi karya tulisnya berisi mengenai pandangan-pandangan politiknya maupun berisi kritiknya terhadap pemerintah. Perjuangannya dalam ranah politik juga dilakukan dengan aksi nyata yaitu bergabung dengan Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat serta mendirikan partai politik.

Karir politik Deliar Noer tentu mendapat berbagai permasalahan, di mana ia beberapa kali berselisih dengan pemerintah baik ketika di Orde Lama maupun masa Orde Baru. Deliar Noer tetap berusaha memberikan kontribusinya dalam pengembangan politik di Indonesia. Strateginya dalam pengembangan pendidikan politik yaitu dengan memaksimalkan publikasi karya tulis, dan menjadi pengamat politik. Upaya lainnya yaitu dengan ikut terjun langsung ke ranah politik dengan mendirikan partai politik.

Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat (Noer, 1983b). Menurutnya kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik membutuhkannya agar dapat melaksanakan kebijakan pemerintah dalam masyarakat. Di masa Orde Baru, usaha dalam mempertahankan pemerintahan tampak dalam setiap keputusan yang diambil, seringkali menguntungkan pihak-pihak tertentu, bahkan pemerintah membatasi masyarakat dari aktifitas politik. Persentuhan antara partai politik dan rakyat hanya sampai pada tingkat kabupaten atau kota.

Kajian teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah kajian sejarah kejiwaan guna membahas mengenai latarbelakang keluarga, organisasi, pendidikan dan lingkungan Deliar Noer. Sejarah kejiwaan merupakan bagian dari penulisan biografi (Kuntowijoyo, 1994). Menurut Kuntowijoyo Biografi adalah catatan mengenai kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain, maka dengan biografi diharapkan dapat dipahami mengenai pelaku sejarah, periode atau zaman yang menjadi latarbelakang hidupnya tokoh yang diteliti dan juga kondisi mengenai keadaan sosial politiknya. Dengan mengetahui latar belakang dari Deliar Noer penulis memaparkan sesuai dengan apa yang didapatkan dari sumber-sumber terkait.

Penelitian yang serupa mengenai Deliar Noer dilakukan oleh Marto di tahun 2008 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Pemikiran Deliar Noer Tentang Islam dan Gerakan Politik di Indonesia”(Marto, 2008), kemudian ada tulisan dari Irpan Iskandar dan Dede Wahyu Firdaus yang berjudul “Pemikiran Deliar Noer Mengenai Gerakan Islam Modern Indonesia 1900-1942(Iskandar & Firdaus, 2020)” dan tulisan dari Ismamizar “Kepemimpinan Negara Negara Menurut Deliar Noer” (Ismamizar, 2017). Penelitian tersebut membahas mengenai pemikiran-pemikiran Deliar Noer baik pemikiran politik, maupun gerakan Islam. Penelitian yang dilakukan saudara Marto lebih memfokuskan pada gagasan, ide, atau cita-cita politik Deliar Noer. Sementara itu, penelitian ini pembahasannya mengenai kiprah perjuangan politik Deliar Noer dalam dinamika politik di Indonesia. Jadi penelitian kali ini lebih memfokuskan pada tindakan atau aksi Deliar Noer terhadap dinamika politik di Indonesia.

Alasan penulis memilih topik penelitian ini dikarenakan belum adanya penelitian yang membahas mengenai kiprah perjuangan politik Deliar Noer dalam dinamika politik di Indonesia. Padahal Deliar Noer merupakan salah satu tokoh politik penting pada masanya dan pemikirannya memiliki pengaruh yang luas dalam pendidikan politik di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kiprah perjuangan politik Deliar Noer dalam dinamika politik di Indonesia? Pemahaman mengenai politik tentu amat penting bagi setiap warga negara, agar nantinya kehidupan politik di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan kepentingan umum dan tentunya masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kiprah politik Deliar Noer dalam dinamika politik di Indonesia periode 1951-1999. Kiprahnya diawali ketika ia menjabat sebagai ketua HMI saat menjadi mahasiswa, kemudian diangkat sebagai staff ahli politik presiden 1966-1968 dan Rektor IKIP Jakarta tahun 1967-1974. Di mana ketika menjabat sebagai rektor IKIP Jakarta ia dituduh sebagai dalang kerusuhan yang dilakukan mahasiswa. Deliar Noer juga aktif dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia serta kerap kali melakukan kritik terhadap kebijakan Orde Baru yang dianggap merugikan masyarakat dan terakhir ia mendirikan partai politik sekaligus menjadi ketuanya.

### **Metode Penelitian**

Metodologi dalam penelitian menggunakan metode sejarah. Metode ini terdiri atas beberapa tahap yaitu pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penyajian bentuk

tulisan (Kuntowijoyo, 2013). Pada tahap pertama yaitu heuristik yang merupakan pengumpulan dan pemilihan sumber-sumber terkait dengan tema penelitian. Penulis mengumpulkan sumber-sumber dengan mencari di perpustakaan nasional, arsip nasional dan mendapatkan buku Otobiografi Deliar Noer yang berjudul “Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa dan buku 80 Tahun Deliar Noer” dan buku lainnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Chudlori Umar yang merupakan mahasiswa Deliar Noer dan ia pernah masuk dalam organisasi yang sama dengan Deliar yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan penulis mendapat koran terkait serta mendapatkan majalah HMI yang berisi kegiatan Deliar Noer di selama menjadi ketua HMI. Tahap kedua yaitu verifikasi dimana penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan untuk dicek keaslian dan kebenaran datanya. Tahap ketiga yaitu interpretasi dimana penulis melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diverifikasi sebelumnya. Dari verifikasi inilah penulis menemukan fakta-fakta baru yang nantinya akan ditulis. Tahap terakhir yaitu penulisan sejarah. Berdasarkan fakta yang telah ditemukan maka penulis menyusunnya dan disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif dan sistematis dengan menguraikan kiprah perjuangan politik Deliar Noer dalam dinamika politik di Indonesia tahun 1951-1999. Kiprahnya diawali ketika Deliar Noer menjadi ketua HMI ketika masih menjadi mahasiswa, kemudian melanjutkan dengan menjadi staf politik presiden tahun 1966-1968, diangkat sebagai rektor IKIP Jakarta tahun 1967-1974, kemudian menjadi penggiat demokrasi dan kerap kali mengkritik berbagai kebijakan Orde Baru yang dianggap menyimpang dan terakhir Deliar Noer mendirikan Partai Ummat Islam dan menjadi ketuanya.

## **Hasil Penelitian**

### **Ketua Himpunan Mahasiswa Islam**

Deliar Noer mengawali karir atau kiprah politiknya ketika masih kuliah di Universitas Nasional (1950-1958) dengan menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), baik ditingkat cabang Jakarta maupun ditingkat pusat. Ditingkat HMI cabang Jakarta, bahkan Deliar Noer merupakan salah satu pendirinya. Cabang HMI Jakarta didirikan tahun 1950 (Gunadirdja, 2001). Deliar Noer menjadi ketua HMI cabang Jakarta pada tahun 1951 hingga 1953. Dimana dalam masa kepemimpinannya, Deliar menerapkan beberapa kebijakan, pertama, HMI menjadi organisasi yang aktif dalam segala bidang kegiatan, termasuk olahraga dan kesenian. Kedua, HMI menjalin kerjasama dengan organisasi pemuda maupun organisasi mahasiswa lainnya. Ketiga, menyebarluaskan HMI ke universitas-universitas di sekitaran Jakarta yang belum mengenal HMI.

Dimasa kepemimpinan Deliar Noer, HMI cabang Jakarta menjalin kerjasama dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI mengenai individu dan masyarakat. Dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat baik dalam bentuk pengabdian maupun lainnya beliau berusaha mengamalkan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI (Tarigan, 2018). Tidak hanya itu, HMI cabang Jakarta juga menjalin relasi dengan tokoh-tokoh partai Islam dengan mengunjungi tokoh partai secara bergantian, menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan dan mengunjungi kantor-kantor partai Islam. kunjungan terhadap partai Islam

lebih sering dilakukan ketika Deliar Noer menjabat sebagai ketua PB HMI, karena saat itu mendekati pemilu tahun 1955.

Setelah berhenti menjabat sebagai ketua HMI cabang Jakarta pada bulan Februari 1953, Deliar Noer kemudian terpilih sebagai ketua umum Pengurus Besar (PB) HMI periode 1953-1955. Ia terpilih dalam kongres yang dilaksanakan di Jakarta pada 30 Agustus sampai 5 September 1953 (Sitompul, 2008b). Selama menjabat sebagai ketua PB HMI, Deliar Noer pernah menghadiri konferensi pada acara World Assembly of Youth (WAY) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1954 di Singapura. Konferensi tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi-organisasi pemuda dari berbagai negara. Tujuannya agar dapat memberikan kesempatan perwakilan pemuda dari berbagai negara dengan latar belakang organisasi yang berbeda untuk bertukar gagasan, dan pengalaman untuk terciptanya pemahaman dan kerjasama global (Noer, 1996).

Pada pertemuan tersebut, HMI mengemukakan gagasannya, di mana HMI menyampaikan mengenai perlunya membentuk Word Moeslem Organization (Sitompul, 2008a). Pendapat dari HMI mendapat respon yang baik dari organisasi-organisasi pemuda Islam yang menghadiri kongres WAY tersebut. Nantinya, untuk merealisasikannya, maka perlu diadakan kongres pemuda Islam sedunia dan yang dipilih sebagai tuan rumah adalah Pakistan yang akan diselenggarakan pada 1 sampai 7 Januari 1955.

Pada bulan April 1955, PB HMI mengadakan pertemuan yang dihadiri semua anggota PB, anggota dan pengurus cabang dari berbagai daerah. Pada pertemuan tersebut, Deliar Noer memberikan pernyataan bahwa perlunya HMI menjaga jarak dengan dinamika politik praktis menjelang pemilu 1955. Selain itu, disepakati juga bahwa jika diantara pengurus HMI nantinya menjadi anggota parlemen baik di DPR maupun MPR maka mereka harus meletakkan jabatan dalam kepengurusan HMI (Mukhtar, 2006). Pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya akan dilaksanakan kongres PB HMI pada bulan Oktober 1955. Kongres tersebut nantinya akan memilih dan menetapkan ketua PB HMI yang baru untuk menggantikan Deliar Noer.

### **Menjadi Rektor IKIP Jakarta**

Sebelum menjadi rektor IKIP Jakarta, Deliar Noer memiliki beberapa pekerjaan mulai dari ketika masih bersekolah maupun mahasiswa. Sekitar tahun 1945 hingga 1949 Deliar beberapa kali berganti pekerjaan. Pada tahun 1945 Deliar bekerja di salah satu penerbit koran yaitu "Berita Indonesia" yang terletak di Jalan Percetakan Negara, terusan Gang Tengah. Di Berita Indonesia beliau bekerja sebagai korektor sekaligus mengantarkan koran yang telah terbit ke berbagai agen. Namun, di tahun 1946 Deliar Noer pindah bekerja di Kementerian Penerangan yang berkantor di Jalan Cilacap tetapi hanya sebulan bekerja disana (Noer, 1996).

Pada bulan Februari 1947, Deliar Noer bekerja di Radio Republik Indonesia sebagai penyiar. Dalam pekerjaannya, ia tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga ulasan atau komentar dan memutar lagu-lagu. Namun, setelah terjadi Agresi Militer Belanda I kantor RRI dikuasai Belanda yang membuat pekerjaannya terhenti. Deliar Noer juga pernah menjadi

sekretasi pribadi Mohammad Natsir tahun 1955-1959 sebelum akhirnya berhenti karena Deliar Noer harus melanjutkan studinya di Amerika Serikat.

Sepulangnya dari Amerika Serikat Deliar Noer bekerja di Universitas Sumatera Utara tahun 1963-1965 dengan menjadi dosen. Di tahun ketiganya Deliar Noer diberhentikan karena dituduh sebagai orang yang anti terhadap manifesto politik soekarno (Noer, 1996). Setelah Soekarno digantikan oleh Soeharto sebagai presiden, Deliar Noer mendapat kepercayaan dengan diangkat sebagai tim staff ahli presiden. Pengangkatannya ini diharapkan agar Deliar Noer dapat menarik massa kalangan Islam (HMI) untuk mendukung kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, pada tahun 1967 Deliar Noer dilantik sebagai rektor IKIP Jakarta hingga tahun 1974. Pada masa jabatannya sebagai rektor IKIP Jakarta Deliar Noer menerapkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu memperbaiki administrasi IKIP Jakarta, pengembangan mutu ilmiah dan pengembangan mahasiswa. Tidak hanya itu, Deliar Noer juga membangun beberapa gedung baru diantaranya gedung rektorat, gedung kreatifitas mahasiswa, laboratorium dan ruang pembelajaran baru.

Namun, pada akhirnya ditahun 1974 ia diberhentikan karena dianggap sebagai orang yang memprovokasi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi pada peristiwa Malari. Kecurigaan menteri karena tulisan Deliar Noer yang berjudul “Mencari Jalan Keluar Dari Kemelut Sekarang” yang dimuat dalam surat kabar Harian Abadi. Isi dari tulisan tersebut Deliar Noer mengkritik pemerintah karena lebih mementingkan penertiban dan sanksi terhadap mahasiswa. Menurutnya, pemerintah seharusnya menekankan pembinaan dan aspirasi dan tuntutan mahasiswa. Akibatnya Deliar Noer diperiksa dan diawasi lebih lanjut oleh menteri serta tulisan-tulisannya pun baik teks pidato maupun lainnya harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Bahkan, isi teks pidato pengukuhan sebagai guru besar diharuskan untuk diganti oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Syarif Thayeb (Noer, 1996). Menurut menteri, isi teks pidato Deliar Noer tidak seyogyanya disampaikan oleh seorang rektor karena ada beberapa poin yang dikhawatirkan dapat memprovokasi mahasiswa dan masyarakat.

Deliar Noer pada akhirnya tidak setuju untuk mengganti isi teks pidato pengukuhan sebagai guru besar, karena menurutnya apa yang ia tulis dan hendak disampaikan telah sesuai dengan ranah akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ia juga tidak mempermasalahkan jika pidato pengukuhan harus dibatalkan karena pengukuhan sebagai guru besar tidak bergantung pada pidato tersebut. Namun, sayangnya karena hal itu ia terpaksa harus diberhentikan sebagai rektor IKIP Jakarta dan bahkan Deliar Noer mendapat larangan untuk mengajar diberbagai universitas di Indonesia.

### **Memperjuangkan Demokrasi**

Deliar Noer dapat disebut sebagai doktor ilmu politik pertama di Indonesia bersama dengan Prof. Miriam Budiardjo. Selain itu, beliau juga yang meletakkan dasar-dasar pengembangan ilmu politik di Indonesia (Republika, 1996). Sumbangsihnya dalam pendidikan politik di Indonesia memang tidak dapat diragukan, bahkan beliau merupakan pelopor mata kuliah “Pemikiran Politik Barat” di jurusan ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Deliar Noer mendeskripsikan politik sebagai aktifitas atau sikap yang erat kaitannya dengan kekuasaan dan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Oleh sebab itu, kekuasaan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari politik, karena politik membutuhkannya untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakannya (Noer, 1983b).

Kebijakan yang telah disusun oleh pemegang kekuasaan politik (pemerintah) harus mementingkan kepentingan masyarakat secara luas. Namun, tidak jarang pemerintah justru hanya mementingkan golongan tertentu. Misalnya dalam hal pembangunan yang seharusnya dapat menyejahterakan rakyat namun orientasinya berubah menjadi pembangunan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah secara maksimal. Orientasi yang seperti ini membuat pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pusat cenderung sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan pajak dan retribusi (Syahrie, 2009). Perkembangan politik di Indonesia baik dari Orde Lama ke Orde Baru maupun ke Reformasi tentu menjadi perhatian bagi Deliar Noer. Berbagai perubahan politik yang terjadi harus mengedepankan kepentingan rakyat dan melalui cara-cara yang demokratis karena bagaimanapun juga rakyat yang memegang kedaulatan dalam sebuah negara demokrasi (Timu, 2001). Tegasnya pada demokrasi, rakyat merupakan pemegang hierarki tertinggi dalam negara atau pemerintahan. Di mana setiap kebijakan atau keputusan harus mengedepankan kepentingan rakyat. Apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat secara umum, maka rakyat berhak untuk menolaknya agar kebijakan dapat diperbaiki.

Salah satu penyimpangan Orde Baru adalah dalam hal pemilu, di mana setiap kepala daerah, bahkan yang ditingkat desa sekalipun mengerahkan masyarakat agar memilih Golkar. Tidak hanya itu, para pegawai pemerintah tidak dibenarkan bergabung ke partai PPP dan PDI. Partai yang ikut serta dalam pemilu juga dibatasi, hanya ada tiga partai yaitu PPP, PDI dan Golkar. Khusus untuk PPP dan PDI mereka didirikan dari gabungan beberapa partai politik, di mana NU, Parmusi, PSII dan PERTI kemudian membentuk diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berlandaskan nasionalisme merupakan gabungan dari PNI, Partai Murba, Partai Katolik dan Parkindo (Noer, 2007b). Padahal, salah satu ciri dari negara demokrasi adalah dengan banyaknya partai politik yang terlibat dalam pemilu.

Pada masa Orde Baru, Deliar Noer merupakan salah satu pejuang demokrasi di Indonesia. Keatifannya dalam memperjuangkan demokrasi yaitu ketika beliau ikut bergabung dalam kegiatan Kelompok Kerja Petisi 50. Meskipun beliau tidak ikut menandatangani petisi 50 namun Deliar Noer seringkali menghadiri acara rutin yang dilakukan para tokoh Petisi 50. Pertama kali Deliar Noer hadir di acara tersebut ketika acara dilakukan di rumah Ali Sadikin yang dilaksanakan di tahun 1989 ketika itu Deliar Noer diundang sebagai pembicara di acara tersebut. Tidak hanya itu, Deliar Noer juga tergabung dalam Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat (FPKR) yang didirikan pada 22 Agustus 1991 di rumah Ali Sadikin di Jalan Borobudur 2, Jakarta. Pembentukan FPKR sebagai upaya untuk mewujudkan gagasan konstitusional mencerdaskan bangsa. Selain itu, FPKR juga tidak hanya memfokuskan pada persoalan politik, tetapi juga mencakup bidang sosial, budaya dan ekonomi (Noer, 1996). Di

organisasi FPKR, Deliar Noer ditunjuk sebagai salah satu koordinator/pengurus bersama dengan Abdul Madjid dan Darshono.

Pada jumpa pers yang diadakan di rumah Ali Sadikin pada 22 Agustus 1993 bertepatan dengan hari jadi FPKR ke-2, Abdul Madjid menyampaikan bahwa FPKR mengajak pemerintah untuk berdialog terbuka terkait permasalahan yang ada seperti penegakan HAM, pelaksanaan UUD dan Pancasila yang menyimpang dan sebagainya. Deliar Noer juga menambahkan, bahwa ia pernah mengajak Badan Pembinaan Pendidikan Pedoman Pengkhayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) untuk berdialog dengan FPKR namun, ajakan tersebut justru ditolak dengan alasan tidak ada waktu untuk berdialog (OSD, 1993). Dalam memperjuangkan Demokrasi, Deliar Noer tidak hanya melalui pemikiran-pemikirannya, tetapi sikap dan perilakunya juga ikut andil dalam mengusahakan reformasi sistem politik dan menciptakan kehidupan yang demokratis di Indonesia. Maka tidak heran jika Deliar Noer disebut sebagai seorang pejuang demokrasi (Sadikin, 2001).

### **Kritik atas Dwifungsi Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI)**

Angkatan bersenjata memiliki kelebihan dalam organisasi dibandingkan dengan masyarakat biasa. Dalam organisasi tentara, hubungan antar sesama anggota dibarengi dengan hierarki. Pemegang kendali atau komando militer ada pada pimpinan dan mereka memiliki sikap disiplin yang kuat (Noer, 2007b). Di masa Orde Baru, orang militer turut serta masuk ke organisasi atau instansi lain. Dengan masuknya militer di instansi pemerintah membuat orang militer mempunyai peran dan pengaruh terhadap politik di Indonesia. Tegasnya ABRI menjadi salah satu kekuatan politik selain partai-partai yang ada pada saat itu (Eko at all, 2020). Peran angkatan bersenjata bagi Orde Baru merupakan suatu hal yang sangat penting. ABRI menjaga dominasi negara terhadap masyarakat dan juga melakukan intervensi di bidang politik dengan membenarkan doktrin dwifungsi ABRI. Menurut doktrin tersebut ABRI mempunyai dua peran yang keduanya saling berkaitan. Pertama, membela negara dari ancaman militer yang berasal dari luar negeri. Kedua, mempertahankan negara dari bahaya dalam negeri (Liddle, 2001).

ABRI melakukan intervensi dengan berkedok dwifungsi, mereka menempatkan anggotanya baik yang aktif maupun yang sudah pensiun di MPR, DPR, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai eksekutif dan staf pemerintahan. Bahkan, ABRI juga pernah mencampuri urusan internal partai politik dengan melakukan intervensi terhadap masalah internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam pemilihan ketua umum partai tersebut. Tidak hanya itu, ABRI juga mempunyai hubungan dengan Golkar, hubungan tersebut dianggap kontroversial karena orang-orang Golkar banyak terdiri dari kalangan militer. Hal itu menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik yang didukung kalangan militer dan juga kalangan sipil.

### **Penolakan atas Asas Tunggal Pancasila**

Gagasan mengenai Pancasila yang dijadikan sebagai asas tunggal bagi partai politik ataupun organisasi masyarakat mulai muncul sejak pidato kenegaraan presiden Soeharto di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 1982. Pancasila ditetapkan secara

resmi sebagai asas tunggal bagi setiap partai politik pada tahun 1985, dimana tujuan dari penetapan ini untuk mengendalikan Islam politik, menjaga stabilitas dan menghilangkan ideologi ekstrem. Pada saat itu, hanya Nahdlatul Ulama (NU) yang menerima gagasan tersebut dengan alasan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Utama, 2020).

Menurut Deliar Noer, jika gagasan asas tunggal partai diterima, dikhawatirkan nantinya akan ada lanjutan mengenai partai tunggal atau bisa saja dengan ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal partai meskipun terdapat lebih dari satu partai politik ini hanya suatu formalitas belaka karena sebenarnya pemerintah dapat mengendalikan partai politik yang ada (Noer, 1983a). Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan partai yang terlalu hegemonik atau dominan (dalam hal ini partai Golkar), di mana partai politik lain tidak dapat bersaing dengan Golkar, apalagi pemerintah juga kerap kali melakukan intervensi terhadap partai politik lain (PDI dan PPP). Padahal asas lain seharusnya tidak menjadi persoalan, asalkan asas tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan setiap partai politik tetap menegakkan Pancasila. Penetapan asas tunggal Pancasila menimbulkan pertanyaan mengenai demokrasi di Indonesia. Apakah negara ini masih berpijak pada demokrasi yang memberi kesempatan dan kebebasan kepada setiap orang/golongan untuk berpikir lain, berbeda pendapat dan mengembangkan pikiran yang berbeda atau justru demokrasi hanya dijadikan formalitas belaka karena terdapat penguatan pendapat dan pikiran yang tidak boleh dikembangkan.

### **Mendirikan Partai Politik**

Lahirnya reformasi dan kejatuhan rezim Orde Baru mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Demokrasi diyakini sebagai ciri atau karakteristik reformasi (Kaesiepo, 1998). Semangat mewujudkan kehidupan yang demokratis berusaha direalisasikan dengan berbagai isu yang sebelumnya di era Orde Baru tidak dapat diwujudkan, seperti pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, mewujudkan hak asasi manusia, menciptakan keadilan dan kesetaraan hukum, terjaminnya kebebasan pers, terjaminnya kebebasan berkumpul dan berserikat. Salah satu bentuk dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah dengan banyaknya pendirian partai politik baru, di mana Deliar Noer pun ikut serta dalam mendirikan partai politik. Deliar Noer memahami Islam tidak hanya sebagai agama yang terbatas pada ajaran, tetapi mencakup juga pemikiran dan gerakan. Beliau merupakan cendekiawan Muslim yang berusaha memadukan Islam pemikiran dan gerakan yang relevan agar sesuai dengan konteks Indonesia modern (Wahid, 2001). Untuk merealisasikan Islam gerakan dalam perjuangan politiknya, dibuktikan dengan mendirikan Partai Ummat Islam (PUI). Pendirian partai Islam, bukan berarti Deliar Noer ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, melainkan untuk menciptakan kehidupan bernegara yang dalam setiap aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi dan lainnya didasari moral Islam.

Partai Ummat Islam dideklarasikan di Masjid Al-azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Jumat 26 Juni 1998. Dalam deklarasi PUI juga dihadiri oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin dan sejumlah rekan-rekan beliau. Dalam keterangannya, Deliar Noer menyatakan PUI akan ikut serta dalam pemilu yang akan datang dan untuk

mewujudkannya, PUI akan segera menyelenggarakan muktamar untuk menyusun keanggotaan serta memilih ketua partai (PEP, 1998). Sebagai langkah awal, Deliar Noer mulai mendirikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) diberbagai lokasi yang tersebar di pulau Jawa dan Sumatera. Hal itu dilakukannya sebulan setelah pendirian partai hingga menjelang pemilu tahun 1999.

Pendirian partai politik ini, bukan yang pertama kali dilakukan oleh Deliar Noer. Sebelumnya, di tahun 1960-an ia pernah terlibat pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang diinisiasi oleh Mohammad Hatta. Bersama dengan Mohammad Hatta, Deliar Noer beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membahas rencana tersebut. Pertemuan itu, dilakukan dengan organisasi pemuda seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Masyumi, dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Namun, PDII batal didirikan karena pada saat itu, pemerintah Orde Baru berencana menerapkan kebijakan fusi partai politik. Susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, baru terbentuk pada 19 Maret 1999 setelah dilaksanakannya Musyawarah Kerja Nasional (mukernas) ke-1 yang dilaksanakan di Bandug, Jawa Barat. Dalam mukernas tersebut Deliar Noer terpilih sebagai ketua umum partai, ditemani Dr. Harun Alrasid sebagai wakil ketua umum. Selain itu, mukernas juga membahas mengenai persiapan-persiapan PUI menjelang diadakannya pemilu pada tanggal 7 Juni 1999.

Kampanye partai juga rutin dilakukan oleh Deliar Noer, beberapa kampanye yang diadakan berhasil diselenggarakan di beberapa daerah seperti Bandung, Pamekasan, Malang, Cirebon, Palembang, Medan, Padang dan lain sebagainya. Melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap partainya membuat beliau optimis dapat meraih sekitar 10% suara bahkan lebih. Namun, hasil dari pemilu tahun 1999 tidak sesuai apa yang beliau harapkan, partainya tidak mendapat cukup suara untuk memperoleh kursi di parlemen (Noer, 2007a). Dengan hasil tersebut, membuat PUI jika ingin kembali mengikuti pemilu mendatang di tahun 2004 harus menjadi partai baru. Untuk itu, maka PUI mengadakan kongres di Kaliurang, Yogyakarta pada tanggal 13-16 Oktober 1999. Pada kongres tersebut membahas mengenai perlunya mengganti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan mengganti nama partai serta perlu menetapkan DPP partai baru untuk periode 1999-2004. Sejak saat itu, PUI telah berganti nama menjadi Partai Ummat Islam Indonesia atau PUII (Noer, 2007a).

Kegagalan Deliar Noer dalam pemilu bisa disebabkan karena Deliar Noer tidak mempunyai basis pendukung yang luas dan fanatik. Deliar Noer juga tidak menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang kharismatik bagi ummat Islam. Selain itu, ia kurang bisa memainkan ikatan emosionalnya dengan permasalahan umat dan lamban merespon masalah dan tuntutan umat. Oleh karenanya, Deliar Noer jarang sekali melontarkan aksi maupun reaksi di media massa yang mengarah pada politik praktis. Seorang tokoh politik harus bisa memainkan emosi umat dan pengikutnya serta tampil di depan dengan melontarkan pernyataan-pernyataan atas kepentingan umat/rakyat. Hal itu yang tidak dimiliki oleh Deliar Noer, dan karenanya beberapa faktor tersebut yang membuat beliau dan partainya tidak memiliki daya pikat yang kuat untuk menarik massa pada pemilu 1999 (Naim, 2001).

## Kesimpulan

Deliar Noer mengawali karir politiknya ketika masih menjadi mahasiswa dengan menjadi ketua HMI di mana melalui HMI ini Deliar Noer mengenal tokoh nasional saat itu seperti Mohammad Hatta, dan Mohammad Natsir yang keduanya tentu mempunyai pengaruh terhadap pemikiran dan tindakan yang dilakukan Deliar Noer. Setelah belajar Amerika Serikat Deliar Noer diminta menjadi rektor IKIP tahun 1967 namun ditahun 1974 ia diberhentikan karena permasalahannya dengan menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya karir politiknya lebih banyak dilakukan dengan menerbitkan karya tulis yang isinya kebanyakan mengenai kritiknya terhadap kebijakan Orde Baru seperti penolakannya terhadap asas tunggal pancasila, kritik atas kebijakan dwifungsi ABRI. Pada tahun 1991 bergabung dengan FPKR dalam memperjuangkan demokrasi dan tahun 1998 mendirikan partai politik bernama Partai Ummat Islam. Namun, Partai Ummat Islam tidak berhasil dalam pemilu 1999 karena suara yang diperoleh tidak mencapai ambang batas minimal.

## Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga berterimakasih kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. selanjutnya, penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yang telah memberikan dukungan baik secara finansial maupun secara moral. Tidak lupa juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan terkait tema penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

## Daftar Rujukan

- Anang, A. (2020). Genealogi Aliran-Aliran Politik Dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 4(2), 68–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29408/fhs.v4i2.2592>
- Eko, A. R. and all. (2020). Dwifungsi ABRI Dalam Konflik Internal PDI 1976-1998. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 179–192. <https://doi.org/10.36706/jc.v9i2.11162>
- Gunadirdja, A. (2001). Deliar Noer, Pendiri HMI di Jakarta. In S. H.A. (Ed.), *Begawan Politik: Deliar Noer 75 Tahun*. Panitia Penerbitan Buku 75 Tahun Prof.Deliar Noer.
- Iskandar, I., & Firdaus, D. W. (2020). Pemikiran Deliar Noer Mengenai Gerakan Islam Modern Indonesia 1900-1942. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 1(1), 16–38. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v1i1.2>
- Ismamizar. (2017). Kepemimpinan Negara Menurut Pandangan Deliar Noer. *Jurnal Al-Lubb Universitas Negeri Islam Sumatera Utara*, 2(1). <https://adoc.pub/kepemimpinan-negara-menurut-pandangan-deliar-noer-ismanizar-.html>
- Kaesiepo, M. (1998, July 26). Fenomena Kelahiran Partai-partai Politik Baru Mencari Konfigurasi Baru yang Kukuh dan Stabil. *Kompas*, 007.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah* (1st ed.). Tiara Wacana.

- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Liddle, R. W. (2001). Rezim: Orde Baru. In D. K. Emmerson (Ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marto. (2008). *Pemikiran Deliar Noer Tentang Islam dan Gerakan Politik di Indonesia*. Uin Sunan Kalijaga. [https://digilib.uin-suka.ac.id/2657/1/BAB I%20CV.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/2657/1/BAB%20I%20CV.pdf)
- Mukhtar, S. (2006). *HMI Dan Kekuasaan* (A. Sofyan (ed.)). Prestasi Pustaka.
- Naim, M. (2001). Deliar Noer dan Pola Kepemimpinan Politik: Catatan atas Kegagalan PUI dalam Pemilu 1999. In H. A. Saripudin (Ed.), *Begawan Politik: Deliar Noer 75 Tahun*. Panitia Penerbitan Buku 75 Tahun Prof.Deliar Noer.
- Noer, D. (1983a). *Islam, Pancasila Dan Asas Tunggal*. Yayasan Perkhidmatan.
- Noer, D. (1983b). *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. C.V Rajawali.
- Noer, D. (1996). *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*. Mizan.
- Noer, D. (2007a). *80 Tahun Deliar Noer*. Hilal Publishing House.
- Noer, D. (2007b). *Ideologi, Politik & Pembangunan*. LPPM Tan Malaka.
- OSD. (1993, August 25). FPKR Ajak Pemerintah Adakan Dialog Terbuka. *Kompas*, 016.
- PEP. (1998, June 27). Deliar Noer Dirikan Partai Ummat Islam. *Kompas*, 006.
- Republika. (1996). Ilmuan Politik Langka. In H. A. Saripudin (Ed.), *Begawan Politik: Deliar Noer 75 Tahun*. Panitia Penerbitan Buku 75 Tahun Prof.Deliar Noer.
- Sadikin, A. (2001). Cendekiawan, Pendidik, dan Pejuang Demokrasi. In H. . Saripudin (Ed.), *Begawan Politik: Deliar Noer 75 Tahun*. Panitia Penerbitan Buku 75 Tahun Prof.Deliar Noer.
- Sitompul, A. (2008a). *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 1947-1993*. Misaka Galiza.
- Sitompul, A. (2008b). *Sejarah Perjuangan HMI (1947-1975)*. CV Misaka Galiza.
- Syahrie, S. P. (2009). Politik Pembangunan Orde Baru. *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol. 6, 1–11. <https://doi.org/10.21009/lontar.061.01>
- Tarigan, A. A. (2018). *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI: Teks, Interpretasi, dan Kontektualisasi* (N. S. Nurbaya (ed.)). Simbiosis Rekatama Media.
- Timu, C. S. K. (2001). Cendekiawan Bervisi Kenegarawanan. In H. . Saripudin (Ed.), *Begawan Politik: Deliar Noer 75 Tahun*.
- Utama, V. R. (2020). *Menjerat Gus Dur*. PT NUmedia Digital Indonesia.
- Wahid, S. (2001). Konsistensi pada Jalur Islam Pemikiran dan Gerakan. In H. . Saripudin (Ed.), *Begawan Politik: Deliar Noer 75 Tahun*. Panitia Penerbitan Buku 75 Tahun Prof.Deliar Noer.